

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KINERJA WALIKOTA

(Studi Kasus pada Bagian Sekretariat Satpol PP Kota Palembang)

Febriansyah Marpaung¹, Emiwati², Abdul Herman³, Bambang Irawan⁴, Abdul Rasyid⁵

^{1),2),3),4),5)} Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Email Correspondence : febriansyahmarpaung1978@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Palembang Mayor Regulation Number 71 of 2016 Concerning the Main Duties and Functions of Civil Service Police Units in Supporting the Mayor's Performance (Case Study in the Secretariat of the Civil Service Police Unit of Palembang)", with the aim of knowing the implementation of Palembang Mayor Regulation Number 71 of 2016 concerning The main tasks and functions of the Civil Service Police Unit in supporting the mayor's performance. The research approach used in this research is using descriptive qualitative research. The data sources used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, a number of things can be recommended, namely: 1) jointly venture to assess the situation and public statements about employees and their facts, acknowledge what is good and what is not good and try to correct what is not good. 2) to carry out an assessment, we must socialize with fellow employees who have given directions so that the implementation of their main tasks and functions runs optimally

Keywords: *Implementation, Mayor Regulation, Civil Service Police Units*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Kinerja Walikota (Studi Kasus Pada Bagian Sekretariat Satpol PP Kota Palembang)", dengan tujuan Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kinerja walikota. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu: 1) secara bersama-sama memberanikan diri untuk menilai keadaan dan ucapan-ucapan masyarakat tentang pegawai dan faktanya, mengakui yang baik dan tidak baik serta berusaha memperbaiki yang tidak baik. 2) untuk melakukan penilaian maka kita harus bersosialisasi dengan rekan-rekan pegawai sudah memberikan arahan-arahan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai organisasi yang mengemban pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota dengan aparat kepolisian republik indonesia, penyidik aparat negeri sipil (PANS) dan/atau aparat lainnya, kepada seluruh perangkat/instansi vertikal pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, dan guna penyesuaian anggaran organisasi.

Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang sebagai organisasi publik yang memiliki tugas

pokok melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota memerlukan informasi mengenai kinerja aparatur yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Secara mental setiap aparat birokrasi, masih ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukkan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Hal ini dapat ditunjukkan pada kondisi riil yang ada yakni manakala Pimpinan melakukan Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan.

Dari berbagai kondisi sumber daya aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang tersebut menampakkan bahwa kesiapan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal aparatur belum sepenuhnya terwujud, kinerja pemerintah masih dihadapkan permasalahan-permasalahan tidak efisien, tidak efektif, dan kurang profesional.

Dalam upaya peningkatan kinerja suatu lembaga atau instansi merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena bersentuhan dengan masalah etos kerja aparat dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program kerja. Inilah sebagian kelemahan dalam meningkatkan kinerja tersebut. Fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik adalah hal yang terpenting dan menjadi tolok ukur untuk mengukur atau mengetahui, apakah fungsi-fungsi aparatur pemerintah lainnya secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara proporsional dan terarah bagi para aparatur, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektualitas dan keterampilan yang dimiliki aparatur dalam operasional kerjanya dapat ditingkatkan, sehingga aparat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Hal itulah yang menjadi tujuan

koordinasi dan komunikasi dalam suatu lembaga.

Pada dasarnya koordinasi ditujukan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh aparat maupun yang dilakukan oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya belum tentu berjalan dengan baik, karena berbagai hambatan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia maupun yang disebabkan oleh sistem atau sasarannya. Ketidak lancaran koordinasi dan komunikasi akan mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas lembaga.

Berbagai bentuk usaha dilakukan untuk dapat lebih mengefektifkan dan mengefisienkan faktor sumber daya manusia tersebut, salah satunya adalah melalui pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, pada posisi jabatan yang tepat (*the right man in the right place, on the right man on the right job*), sehingga sasaran pekerjaan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Untuk menggali potensi peningkatan kinerja, maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Walikota

Palembang Nomor 71 tahun 2016 tentang tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Palembang. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis mencoba untuk memilih judul tesis ini, yaitu : Implementasi Peraturan Walikota Palembang No. 71 Tahun 2016 tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menunjang kinerja walikota (Studi Kasus pada Bagian Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang).

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kinerja walikota.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dikatakan juga merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah publik. Dalam pemecahan suatu permasalahan perlu diupayakan tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Ripley (1985:49), tahap-tahap tersebut adalah (1)*Agenda of*

Government, (2)*Formulation and legitimation of goals and program*, (3)*Program implementation*, (4)*Evaluation of implementation performance and impacts*, (5)*Decision absent the future of policy and program*.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, *Udoji* dalam Wahab, menyatakan bahwa “Implementasi adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan” (Wahab, 2001: 59).

Bardach (dalam juliarta, 2009:21) mengartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Sementara itu George C Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena

kebijakan (Wahab, 1990:124). Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat empat faktor atau variabel kritis yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi. Keempat faktor ini berinteraksi secara simultan untuk membantu atau menghalangi implementasi kebijakan.

3. Pengertian Kinerja

Menurut LAN (2004:131) : Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, pencapaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan / efisiensi / produktivitas / efektivitas dalam mencapai tujuan. Menurut Mohd. Basri (2005:16), disebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Sedangkan pengertian kinerja menurut pendapat Waluyo (2007:116), adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standar kerja.

4. Kinerja Organisasi

Pengertian kinerja secara umum dapat dikatakan sebagai besarnya kontribusi atau hasil yang dicapai akan diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan atau sasaran-sasaran organisasi di mana ia bekerja (William B. Werther dan Keith Davis, 1993:67). Kinerja pegawai dalam organisasi merupakan tanggung jawab utama seorang manajer, dimana manajer membantu pegawainya agar berprestasi lebih baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu pegawai apa yang diharapkan manajemen untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian harus mengenali prestasi serta membuat rencana untuk meningkatkan kinerja pegawai (John Soeprihanto, 1991 : 7).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menunjang kinerja walikota. Dalam penelitian ini unit analisis adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Bagian Sekretariat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian

Sekretariat sebagai implementor. Sebagai informan pendukung adalah staf pegawai dan masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Analisis Implementasi pada aspek isi kebijakan

Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator antara lain: indikator kepentingan yang dipengaruhi, indikator tipe manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan, pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan.

a. Kepentingan yang dipengaruhi

Dari hasil penelitian bahwa kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdapat pada peran serta pegawai dalam mewujudkan standar pelayanan bagi pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, hal ini berarti bahwa

pemerintah dan pegawai mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan program terutama sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka laksanakan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bisa berhasil.

b. Tipe Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memberikan manfaat bagi pegawai terutama dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Manfaat tersebut bisa dirasakan jika program ini benar benar dijalankan oleh pegawai sesuai dengan tata cara yang telah dianjurkan oleh para Pimpinan dalam program ini.

c. Derajat perubahan yang diharapkan

Indikator keberhasilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeteksi keberhasilan program kerja. Untuk implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016, secara umum indikator keberhasilan secara komprehensif ditetapkan pada akhir program 3 tahunan, mengingat setiap daerah memiliki skala prioritas program yang harus dilaksanakan pada setiap tahun. Oleh karena itu indikator keberhasilan tiap tahun akan dilihat dari keberhasilan program tahunan, sedangkan indikator keberhasilan 3 tahunan ditetapkan antara lain adalah Memiliki dokumen Tugas Pokok dan Fungsi secara lengkap.

d. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang berjalan dengan baik terbukti dengan penghargaan yang didapat dari pemerintah sehingga di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang memperoleh dana bantuan dari pemerintah sebagai upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pelayanan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Pimpinan.

e. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang meliputi :

1. Pemerintah dan Para pegawai.

Beberapa sumber daya tersebut berperan dalam melakukan penyuluhan - penyuluhan para pegawai mengenai pelaksanaan program. Pemerintah sebagai sumber daya yang terlibat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh informan.

2.Sarana dan Prasarana

Sumber daya ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendukung terwujudnya standar pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Sarana yang digunakan meliputi media untuk penyampaian penyuluhan dalam rangka menerapkan Tugas Pokok dan Fungsi, buku-buku pedoman pelaksanaan program.

3.Pegawai

Pegawai sebagai sumber daya yang dilibatkan berperan sebagai sasaran Tugas Pokok dan Fungsi. Dimana pegawai diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tidak hanya melibatkan Pimpinan dan pemerintah sebagai pelaksana tupoksi namun juga pegawai sebagai sasaran program.

2. Analisis Pada Konteks Implementasi

Pembahasan pada konteks implementasi dalam penelitian mengenai tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dijelaskan dengan tiga indikator yaitu: analisis pada sub indikator kekuasaan kepentingan dan strategi, sub indikator kedua karakteristik lembaga dan penguasa serta sub indikator kepatuhan dan daya tanggap. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer berdasarkan hasil wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan data sekunder dari buku-buku laporan.

a. Kekuasaan Kepentingan dan Strategi

Analisis ini bertujuan untuk melihat strategi lembaga dan penguasa dalam menerapkan kebijakan. Data berasal dari analisis hasil wawancara dengan informan serta data - data sekunder yang berhubungan dengan tugas pokok dan Fungsi. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi atas Adanya upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana tupoksi.

Adapun kekuasaan kepentingan yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mengarahkan pegawai agar dapat berstandar pelayanan sesuai dengan program yang mereka laksanakan. Sedangkan strategi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan bagaimana pegawai dapat dengan mudah melaksanakan program tanpa paksaan. Strategi yang dilakukan pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu dengan mengupayakan penyuluhan-penyuluhan yang efektif untuk para pegawai. Pegawai diarahkan agar mereka bisa menyadari dan tahu akan pentingnya mengikuti penyuluhan sehingga mereka dapat mengupayakan standar-standar pelayanan demi kepentingan diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi yang diterapkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang memiliki strategi yang efektif dari cara - cara yang dilakukan sehingga pegawai mau mengikuti saran yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut salah satunya dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang bearti sehingga pegawai tergerak hati nuraninya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan mengikuti standar-standar pelayanan.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Analisis terhadap karakteristik lembaga dan penguasa sebagai indikator untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik pemerintah terutama petugas didalam melakukan penyuluhan – penyuluhan Program peningkatan mutu pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pembahasan penelitian ini dilihat dari sikap Pimpinan dan pernerintah dalam melakukan penyuluhan para pegawai,

tentunya dengan sikap yang baik maka pegawai dapat mempunyai tanggapan yang dengan dengan maksud dan tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pimpinan dan pemerintah mempunyai sikap yang baik para pegawai dengan memberikari penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara-cara yang baik para pegawai sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang dilaksanakan. Kepatuhan dan daya tanggap ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan program, karena tanpa kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan mengalami kendala karena pegawai tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka dapat mendukung pelaksanaan program dengan baik.

Pegawai mempunyai daya tanggap yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Mereka cukup mampu untuk menerima masukan dari

Pimpinan dan pemerintah agar dapat berstandar pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program, berstandar pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

3. Analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan pada penelitian ini terdiri dari faktor yang memudahkan, faktor yang mendukung dan faktor yang memungkinkan.

3.1. Faktor yang memudahkan

Faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dengan mudah kebijakan direalisasikan. Faktor yang memudahkan ini dilihat dari indikator yang dijelaskan dalam pembahasan berikut:

a. Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Apabila suatu tindakan didasari oleh

pengetahuan maka perilaku tersebut akan bersikap langgeng, namun sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama.

Pada dasarnya perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya akan sesuatu hal. Demikian pula dengan standar pelayanan, dimana seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang mutu pelayanan akan cenderung lebih berstandar pelayanan.

Pengetahuan dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa manusia, pengetahuan tidak akan tercipta dan berkembang, begitupun sebaliknya tanpa pengetahuan manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Begitu artinya kedudukan pengetahuan dalam lingkungan kehidupan manusia, pengetahuan ini akan bisa membuat manusia menjadi tahu dan mengerti.

Hal ini juga berlaku pada pegawai selaku sasaran Tugas Pokok dan Fungsi. Pengetahuan standar pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesediaan untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam pencapaian tujuan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pengetahuan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terhadap standar pelayanan sangat baik terutama

setelah dilakukan penyuluhan-penyuluhan oleh pemerintah. Mereka cukup paham dengan maksud dan tujuan adanya pelaksanaan standar pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang cukup tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan keterampilan melalui tugas pokok dan fungsi, sehingga dengan pengetahuan yang ada pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari pegawai.

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana tanggapan pegawai terhadap Program peningkatan mutu pelayanan terutama mengenai sikap pegawai terhadap mutu pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Sikap pegawai terhadap Tugas Pokok dan Fungsi menunjukkan sikap yang baik, dimana pegawai bisa menerima masukan dari pemerintah mengenai program. Sikap ini ditunjukkan dengan

adanya kemauan pegawai untuk mengikuti program secara baik, dan pegawai cukup mudah untuk memahami tujuan pemerintah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mendapat tanggapan dan respon yang baik oleh pegawai, hal ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan program. Karena dengan sikap yang baik maka pemerintah dapat dengan mudah melaksanakan program dan rnendapat dukungan dari pegawai.

3.2. Faktor yang memungkinkan

Faktor-faktor yang memungkinkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam penelitian ini terdiri dari sub sarana stimulan.

a. Sarana Prasarana

Sarana merupakan alat yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan, adapun sarana prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sarana yang digunakan untuk pelaksanaan penyuluhan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi berupa modul-modul, buku-buku pedoman buku rujukan, infocus. Untuk

sarana yang manual berupa OHP dan white board.

3.3. Faktor Yang Memperkuat

Faktor yang memperkuat merupakan faktor - faktor yang memperkuat agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat berjalan dengan baik, faktor ini meliputi indikator penyuluhan.

a. Penyuluhan

Penyuluhan Program peningkatan mutu pelayananyang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu kegiatan pemberian informasi para pegawai tentang standar pelayanan. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu menolong dirinya sendiri untuk selalu berbuat sesuai dengan standar pelayanan

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku individu keluarga dan pegawai sehingga mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya serta ikut berperan serta dalam pembangunan pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dilakukan dengan upaya penyuluhan - penyuluhan para pegawai sebagai sasaran program agar mereka bisa menerapkan standar pelayanan sesuai dengan harapan program. Adanya penyuluhan ini menjadi

faktor yang memperkuat terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan kepada Pimpinan untuk mengawasi pegawai, pada hakekatnya adalah merupakan suatu tugas berat yang harus diemban oleh pimpinan untuk mengawasi perilaku Pegawai, pelaksanaan jabatan Pegawai dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dari para pegawai. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
2. Dengan adanya fungsi, wewenang dan kewajiban pegawai agar supaya para pegawai dapat berpartisipasi baik dalam melakukan kewajiban-kewajibannya seperti membuat laporan bulanan tentang kegiatan yang dilaksanakan, juga akan memberikan sanksi terhadap pegawai yang berperilaku tidak baik, yang tidak memenuhi kewajiban dan yang melanggar larangan, untuk itu harus ada kerjasama dan ikut mendukung serta memberi bantuan baik moril

maupun materil agar supaya dapat menjalankan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Saran

1. Secara bersama-sama memberanikan diri untuk menilai keadaan dan ucapan-ucapan masyarakat tentang pegawai dan faktanya, mengakui yang baik dan tidak baik serta berusaha memperbaiki yang tidak baik.
2. Untuk melakukan penilaian maka kita harus bersosialisasi dengan rekan-rekan pegawai sudah memberikan arahan-arahan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin, 2001. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solihin, 1990. *Analisis Kebijaksanaan : Dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bryson, Jhon. 1999, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Putaka Belajar.
- Cahyani, Ati. 2005. *Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Effendi, Irzal dan Oktariza, Wawan. 2006. *Manajemen Agribisnis Perikanan*

- Cetakan I.* Jakarta: Penebar Swadaya.
- Grant, Robert. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer*. Jakarta : Erlangga.
- Grindle, Marrilles. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third word*. New York: Pricenton University Press.
- Islamy, 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Edisi II Cetakan ke 7*. Jakarta: Numi Aksara.
- Juliarta, Edwar, 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Tri Rimba Persada.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit YAPI.
- Nugroho, D.Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Indonesia.
- Riwu Kaho, Josef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta PT. Grafindo.
- Salusu. J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Singirimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. Jakarta : LP3ES.
- Satyawan.Dharma. 2004. *Otonomi Daerah dalam Prespektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta.: PT. Penerbit Djambatan.
- Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sukanto, 1989. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta. Gadjahmada Press.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.

